

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya, Bandung.

Hernoko Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

H.S. Salim, 2013, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Niewenhuis J.H, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya.

Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Satrio. J, 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan R, 1994, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.

Simanjuntak. P.N.H, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Soemadipradja Rahmat. S.S, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jutimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti R. Tjitrosudibio R, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (KUH Perdata) Burgelijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perakwinana, Pradnya Paramita, Jakarta.*

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, cetakan ke XII, Jakarta.

_____, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.

Syaifuddin Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum *Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie)* tanggal 30 April 1847 (Staatsblad Tahun 1847 nomor 23).

Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).

Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tentang Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jalan Bandara Tempuling-Mandah Dengan Sistem Tahun Jamak.

C. Peraturan Federasi/Organisasi

Federation International des Ingenieurs-Conseils; International Federation of Consulting Engineers; Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure; Federacion Internacional de Ingenieros Consultores; Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Kontruksi MDB Harmonised Edition Bagi Bangunan Dan Pekerjaan Enjiniring Dengan Desain Oleh Pengguna Jasa

D. Kamus

Black Law Dictionary

Subekti R dan Tjitrosudibyo R, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.